

PLURALITAS AGAMA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Mencari Peran Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum)

Oleh : Marzuki

FIS Universitas Negeri Yogyakarta

Diterima : 5 April 2001 / disetujui : 22 Mei 2001

Abstract

The inter-religious harmony should be done among the pluralistic society like Indonesia. Several ways can be made for building inter-religious harmony. The raising consciousness to appreciate religious freedom from adherents of a religion to others is a key for building this harmony. To make the consciousness grows can be made with several ways, among them is religious study method both by normative-theological approach and critical-empirical approach.

The religious education in university, especially in public university, is one of medium can be made to do religious study for building inter-religious harmony. The religious education can be done by exclusive particularistic way for each adherent of a religion for mastering his religious principles in depth. For building inter-religious harmony, the religious education will be more effectively if it be done by pluralistic way, by participating all of the students from several adherents of a religion to attend the study of religions. They are given the comprehensive understanding to religions, especially about the equality, until they have consciousness to appreciate another religion with available.

Key words: Religious plurality, Inter-religious harmony, and Religious Education.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat pluralitas yang cukup tinggi, baik dalam bidang bahasa, suku bangsa, maupun agama. Bagi negara yang pluralis di bidang agama, seperti Indonesia, kerawanan dan ancaman permusuhan antar warga yang dipicu oleh permasalahan agama sewaktu-waktu akan muncul jika tidak diantisipasi dengan baik. Selama ini pemerintah Indonesia sudah dinilai cukup berhasil dalam membina kerukunan antar umat beragama. Akan tetapi, akhir-akhir ini kerukunan antar umat beragama di Indonesia mendapat tantangan yang cukup serius, terutama akibat terjadinya berbagai insiden yang memakan korban yang tidak sedikit.

Konflik antar umat beragama seperti di Ambon dan Poso, atau di tempat-tempat lain, cukup merepotkan pemerintah dan bangsa Indonesia yang kalau tidak segera diatasi,

dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya. Dengan perubahan era seperti sekarang ini, seharusnya kesadaran masyarakat kita akan arti persatuan dan kesatuan semakin baik, tetapi kenyataannya justru sebaliknya.

Berbagai solusi diupayakan dan bahkan sudah dilaksanakan, di antaranya adalah dialog mencari titik temu agama-agama dan menyusun rancangan kerjasama antar umat beragama dalam rangka membangun bangsa. Di negara kita juga pernah diadakan Peringatan 100 Tahun Parlemen Agama-agama Sedunia yang salah satu targetnya adalah mencetuskan sebuah deklarasi pembentukan "Tim Kerukunan Hidup Umat Beragama" sebagai wadah kerjasama keilmuan dalam bidang

keagamaan (Abdullah, 1999: 4). Bangsa kita sangat mendambakan hasil kajian dan penelitian dalam bidang agama untuk menopang keterlibatan bersama seluruh pengikut agama-agama di Indonesia dalam membina dan menempuh kerukunan hidup antar umat beragama. Solusi lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan adalah melalui Pendidikan Agama di sekolah (lembaga pendidikan formal) mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi (perguruan tinggi).

Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum (PTU) merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan melalui GBHN dan Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang harus dilaksanakan secara optimal dengan dukungan semua pihak secara terpadu. Dalam UU No. 2 ini ditegaskan tujuan mendasar pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya (Pasal 4). Konsep manusia seutuhnya yang diharapkan adalah manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Misi ini dapat dicapai dengan memberikan berbagai mata kuliah yang ada di perguruan tinggi kepada para mahasiswa, termasuk mata kuliah Pendidikan Agama. Bahkan Pendidikan Agama memiliki peran yang sangat berarti dalam mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki kualifikasi seperti itu.

Persoalannya adalah sejauhmana Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi, khususnya di Perguruan Tinggi Umum, dapat dijadikan solusi dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Problem inilah yang akan dicari pemecahannya lewat tulisan yang sangat

sederhana ini. Untuk mengawali pembahasan ini akan diuraikan dulu persoalan pluralitas agama dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Pluralitas Agama dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia

Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa di wilayah kepulauan Nusantara, hanya agama Hindu dan Buddha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Candi Prambanan dan Candi Borobudur adalah saksi sejarah yang paling autentik mengenai hal ini. Setelah dua agama itu berkembang di Nusantara, bahkan keyakinannya sudah mengakar di tengah masyarakat, masuklah agama Islam melalui perdagangan. Proses penyebaran dan pemeluk agama Islam di Nusantara ini berlangsung secara massif dan ditempuh dengan jalan damai (Abdullah, 1999: 5). Masuknya kaum imperialis ke Nusantara, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda, berakibat menyebarnya dua agama lagi ke Indonesia, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Lima agama tersebut terus hidup dan berkembang di Indonesia hingga sekarang serta kemudian diakui sebagai agama resmi oleh negara dan dianut oleh umat beragama di Indonesia.

Dengan memperhatikan kondisi keberagamaan di Indonesia yang majemuk dan juga dibandingkan dengan kondisi keberagamaan di negara-negara lain yang agak berbeda, maka studi agama (*religious studies*) di Indonesia terasa sangat urgen dan mendesak untuk dikembangkan. Untuk mengkaji hal ini, M. Amin Abdullah menawarkan suatu metodologi yang bersifat historis-kritis dengan pendekatan agama yang bersifat komprehensif, multidisipliner, interdisipliner, di samping penggunaan metodologi yang bersifat doktriner-normatif (teologis-normatif)

(Abdullah, 1999: 7). Selanjutnya Amin Abdullah (1999: 12) menambahkan:

Pendekatan jenis apapun juga, baik yang bersifat historis-empiris-kritis maupun yang bersifat teologis-normatif, tidak dapat bersifat *exhaustive*, yakni tidak berpretensi dapat menyelesaikan dan memecahkan persoalan agama setuntas-tuntasnya. Pendekatan agama jenis apapun memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Di atas telah disebut-sebut bahwa semua pendekatan agama tidaklah sempurna dan jauh dari memuaskan, mengingat fenomena agama bersifat kompleks dan *intricate*. Masing-masing tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, terlepas dari yang lain, jika para peneliti agama-agama tidak ingin memperoleh predikat "*reductionist*".

Dalam beberapa waktu kerukunan umat beragama di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan bahkan bisa dibanggakan. Tidak sedikit pengamat dari negara lain kagum akan hal ini. Kerukunan umat beragama di Indonesia telah berjalan wajar meskipun belum dilandasi dengan studi agama yang bersifat akademik-kritis. Kesadaran yang tinggi dari para pemeluk agama untuk hidup bersama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk merupakan modal utama terbinanya kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Pemerintah juga berperan penting terutama dengan pencanangan "Tiga Kerukunan Hidup Beragama" yang dimulai oleh H. Alamsjah Ratu Perwiranegara (Menteri Agama RI periode 1978-1983), yaitu: (1) Kerukunan Intern Umat Beragama; (2) Kerukunan Antar-Umat Beragama; dan (3) Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pemerintah (Ahmad Sukardja, 1995: 165).

Munculnya konflik antar umat beragama di Indonesia kadang-kadang dipicu oleh berbagai hal. Mengenai masalah ini Tarmizi Taher menulis:

Inter religious conflict can similarly happen especially under the following circumstances:

- a. The founding of new places of worship without permit from local government.
- b. Religious proselytizing aimed at gaining new converts from adherents of another religion.
- c. Religious blasphemy or defilement of another's religion (Taher, 1997: 16)

Pemerintah juga membentuk suatu forum konsultasi yang disebut Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Tentang hal ini Tarmizi Taher menulis:

The government established in 1980 the Inter-Religious Consultative Forum (Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama, WMAUB) expressly for building good working relations between the different religious and the government. The WMAUB meets regularly to discuss various social and religious issues. The government also established similar forums at provincial level and in most major cities. The forums have proven an effective enough mechanism for the maintenance of inter-religious harmony and social order (Taher, 1997: 17).

Berbagai persoalan antar umat beragama yang terjadi di negara-negara lain, seperti di Bosnia, Israel (Palestina), Filipina, India, dan Albania, cepat menyebar ke Indonesia melalui arus informasi yang mulai mengglobal. Hal ini mulai merubah *image* hubungan antar umat beragama di tanah air. Persoalan ini terus memicu konflik yang tersembunyi antar umat beragama seperti bara api dalam sekam. Pada akhirnya konflik antar umat beragama ini dapat muncul ke permukaan, seperti terlihat pada konflik agama di Ambon (Maluku) yang hingga sekarang belum mereda. Sebelumnya juga pernah terjadi berbagai konflik keagamaan seperti Tragedi Jalan Ketapang di Jakarta, Tragedi Kupang, dan lain-lain, tetapi konflik-

konflik ini dapat segera diatasi. Konflik Ambon yang masih menghangat ini hingga sekarang belum bisa teratasi dengan tuntas, mengingat kompleksitas permasalahan yang menyertainya. Berbagai upaya sudah ditempuh untuk meredakan konflik tersebut, seperti mempertemukan para pemimpin agama-agama yang bertikai untuk berdialog mencari solusi pemecahan terbaik, turun tangannya pemerintah melalui pasukan TNI, dan lain sebagainya, namun hasilnya belum memuaskan.

Menciptakan kondisi ideal untuk tercapainya titik temu antar umat beragama merupakan kepentingan semua pihak dan tanggung jawab bersama. Beban itu sepenuhnya tidak dapat dipikul oleh umat Islam, umat Nasrani, maupun umat-umat lain secara sepihak, tetapi harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah atau negara. Dalam konteks Islam, hal seperti ini juga pernah terjadi pada sejarah kehidupan Nabi Muhammad Saw. ketika beliau menjadi pemimpin “negara” Madinah. Untuk membina kerukunan antar umat beragama di Madinah, Nabi bersama-sama umat Islam dan para pemeluk agama lain mengadakan perjanjian hidup bersama untuk menunjang tata hidup kenegaraan yang kemudian terdokumentasikan dalam sebuah piagam yang disebut “Piagam Madinah”. Robert N. Bellah menyebut piagam ini sebagai deklarasi modern yang muncul sebelum peradaban manusia yang benar-benar modern timbul (Bellah, 1976: 150). Bahkan menurut penyelidikan terbaru, Piagam Madinah ini merupakan piagam politik (konstitusi) pertama di dunia yang memenuhi persyaratan kenegaraan, bukan konstitusi di Amerika Serikat yang baru muncul tahun 1787, atau di Inggris yang mulai muncul tahun 1215, atau juga di Perancis yang muncul tahun 1795 (Ahmad, 1973: 6).

Dalam perspektif Islam dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat

yang pluralistik secara religius, sejak semula, memang telah dibangun di atas landasan normatif dan historis sekaligus. Jika ada hambatan atau anomali-anomali di sana sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam itu sendiri yang bersifat intoleran dan eksklusif, tetapi lebih banyak ditentukan dan dikondisikan oleh situasi historis-ekonomis-politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat. Kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, kekuasaan politik, hegemoni kekuasaan, jauh lebih mewarnai ketidakmesraan hubungan antar pemeluk agama dan bukan disebabkan oleh kandungan ajaran etika agama itu sendiri.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat beralasan jika “pendekatan Islami” menjadi alternatif pemecahan konflik keagamaan. Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia (Q.S. Al-Nahl (16): 36). Islam juga mengajarkan pandangan tentang kenabian (*nubuwwah*) dan umat yang percaya kepada Tuhan (Q.S. Al-Anbiya’ (21): 92). Selanjutnya ditegaskan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah kelanjutan langsung agama-agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya (Q.S. Al-Syura (42): 13). Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahli Kitab) (Q.S. Al-Ankabut (29): 46). Dalam al-Quran surat Ali Imran (3): 64 juga terdapat pandangan inklusif yang memerintahkan kaum Muslim untuk mengajak kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) menuju pokok-pokok kesamaan, yaitu ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara teologis usaha mendapatkan titik temu ini sangat penting. Adanya ayat-ayat al-Quran yang positif dan simpatik kepada kaum Ahli Kitab, menurut Nurcholish Madjid (1998: xxviii), sebenarnya

mengajak kepada kaum Muslim untuk membuka diri dalam proses dialog untuk mendapat keyakinan bersama tentang kebenaran yang paling mendalam.

Prinsip-prinsip Islam seperti dalam ayat-ayat al-Quran seperti di atas membawa konsekuensi logis larangan memaksakan agama (Q.S. Al-Baqarah (2): 256), dan menghormati penganut agama lain untuk melakukan aktivitas agamanya (Q.S. Al-Kafirun (109): 6). Pendirian ini perlu dikemukakan, karena sampai sekarang masih dirasakan kurangpercayaan kepada prinsip-prinsip tersebut dari berbagai kalangan, baik kalangan sebagian kaum Muslim sendiri maupun kalangan di luar kaum Muslim.

Pada akhirnya perlu dibedakan antara dimensi ajaran agama dan perilaku umat beragama. Dalam hal ini M. Amin Abdullah (1999: 75) menegaskan:

Perilaku umat beragama selain ditentukan oleh normativitas ajaran agamanya, juga sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosio-historis dan politik yang melingkarnya. Ajaran agama yang fundamental hanya bersifat pemberi "warning" terhadap adanya berbagai macam sekat-sekat historis-politis-ekonomis yang seringkali berlindung pada naungan payung emosional aliran teologis tertentu.

Jadi, permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia sekarang ini menjadi semakin kompleks. Konflik yang bernuansa keagamaan dapat dipicu oleh berbagai faktor yang bervariasi, bahkan konflik ini tidak hanya melibatkan kelompok atau umat beragama yang saling bertikai, tetapi ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat di dalamnya. Di sinilah rumitnya menangani konflik-konflik yang bernuansa keagamaan (SARA) di negara kita.

Antisipasi Problem Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mencari Peran Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum

Problem kerukunan antar umat beragama tidak jarang mengganggu stabilitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih daripada perbedaan sekte (aliran) keagamaan, perbedaan agama melibatkan massa yang lebih banyak, sehingga efek psikologis dan sosiologisnya lebih luas. Bentrokan antar umat beragama mampu menggerakkan simpati masing-masing umat beragama di hampir seluruh kawasan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada tataran ini disharmoni antar umat beragama dapat dengan mudah mempengaruhi stabilitas politik, terutama karena campur tangan lembaga-lembaga keagamaan berskala nasional dan internasional. Keberadaan militansi dan kelompok-kelompok fundamentalis memperoleh apresiasi di masing-masing komunitas keagamaan. Selanjutnya, hal ini akan membangkitkan sentimen keagamaan yang meluap-luap yang berujung pada perasaan wajib turut berjuang – dengan jiwa dan raga – membela agama. *Jihad* dan perang suci (*holy war*) merupakan terma-terma unggulan yang secara sosio-psikologis memiliki akar yang kuat, namun secara ontologis tidaklah signifikan. Munculnya "Lasykar Jihad" di kalangan umat Islam untuk Konflik Ambon di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya, merupakan contoh nyata dalam asumsi tersebut. Di kalangan Nasrani juga pernah muncul kelompok militan yang dalam sejarah dikenal dengan sebutan "Tentara Salib" yang sangat berperan dalam peperangan melawan tentara Islam dalam Perang Salib. Hal ini diperkuat oleh pernyataan FL. Hasto Rosariyanto bahwa pelaku sejarah di kalangan Nasrani melaksanakan tugas dan misinya dengan ketulusan yang amat mendalam. Dia menulis, "Mereka melakukannya atas nama

iman, atas nama agama, atas nama Gereja, atas nama Allah ... dan yang tidak kalah tulus: demi keselamatan jiwa sesama manusia” (Rosariyanto, 2001: 115).

Masing-masing umat beragama merasa memiliki agamanya, dan pemilikan ini bersifat primordial. Bahkan agama terlembagakan dan diidentifikasi sesuai dengan jatidiri masyarakat yang bersangkutan, seperti terjadi dalam kasus agama Yahudi, agama Nasrani (Kristen), dan – dengan pola yang agak berbeda – agama Islam (Komaruddin Hidayat dan Nafis, 1995). Pelembagaan ini mencerminkan eksklusivitas atau mungkin primordialisme umat beragama, yang secara sosiologis telah memilah keutuhan masyarakat manusia yang notabene bersaudara. Masing-masing umat beragama mengklaim diri paling benar (*claim of truth*) dan paling selamat (*claim of salvation*), sehingga merupakan kewajiban suci untuk mengajak (berdakwah atau melakukan aktivitas missionaris), bahkan memaksa umat beragama lainnya untuk mengikuti kebenaran dan melalui jalur-jalur keselamatan yang ditempuhnya. Padahal tidak ada ajaran dalam kitab suci yang membenarkan pemaksaan agama.

Kenyataannya, klaim-klaim kebenaran dan keselamatan seperti di atas tidaklah membuat masing-masing umat beragama menyatukan langkah dan menekankan aspek-aspek kesamaan atau kesepadanan, akan tetapi justru saling menysihkan. Konsep atau substansi kebenaran, walaupun secara ontologis bersifat tunggal, tetapi menurut kebanyakan penganut agama berbeda-beda, sehingga orientasi perjuangan umat beragama berbeda-beda pula. Inilah yang memicu terjadinya “perang” antar umat beragama. Dalam konteks ini, pelaksanaan pendidikan agama pada masing-masing komunitas beragama bersifat eksklusif, bahkan seringkali justru memperkuat militansi dan fundamentalisme keberagamaan, tidak hanya sekedar

fanatisme keagamaan. Pesantren-pesantren tradisional dalam komunitas Muslim dan sekolah-sekolah missionari dalam komunitas Kristen merupakan lembaga-lembaga pendidikan yang banyak melahirkan personalitas keberagamaan yang militan dan fundamentalis.

Persoalannya sekarang, bagaimana mengatasi permasalahan agama yang sangat rumit ini. Berbagai upaya ditawarkan dan dilaksanakan seperti yang sudah disinggung di atas, yakni dengan pendekatan studi agama, seperti yang ditawarkan M. Amin Abdullah, dengan penerapan pola Tiga Kerukunan Umat Beragama seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan juga dengan melakukan dialog yang melibatkan para pemimpin agama-agama yang “bertikai”. Tawaran pemecahan ini tampaknya sangat bagus, namun bersifat intelektual sehingga jangkauannya kurang massif. Untuk itu tawaran lain yang perlu diperhatikan adalah pendekatan sosiologis-intelektual melalui pelaksanaan Pendidikan Agama di sekolah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan beragama secara pluralistik di dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selama ini penyelenggara Pendidikan Agama di sekolah, termasuk di Perguruan Tinggi, dilakukan secara partikularistik dan eksklusif, yakni melakukan pembelajaran agama tertentu terhadap peserta didik pemeluk agama tertentu dan tidak melibatkan peserta didik dari pemeluk lain agama. Dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 263 Tahun 2000 Pasal 2 ditegaskan bahwa mata kuliah Pendidikan Agama adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebenarnya penyelenggaraan Pendidikan Agama seperti ini tidaklah keliru, tetapi cara seperti ini kurang memberikan sumbangan bagi

tercapainya kerukunan hidup beragama di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik.

Dasar pemikiran cara seperti di atas dapat dipahami, yakni dengan Pendidikan Agama peserta didik dari agama tertentu diarahkan untuk memahami dengan benar dan sebaik-baiknya ajaran agama yang dianutnya, selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah jalan pikiran yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini terutama melalui Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Pendekatan semacam ini dikenal dengan pendekatan doktriner-teologis-normatif. Pendekatan ini dilengkapi oleh Amin Abdullah dengan penekanannya pada studi agama yang menjadikan agama sebagai suatu bidang kajian ilmiah. Pendekatan kedua ini disebut pendekatan historis-empiris-kritis (Abdullah, 1999: 12). Hanya saja cara ini hanya dapat dinikmati oleh kalangan intelektual saja dan tidak merembes ke dalam keluarga yang bukan intelektual.

Pernah ada usaha menyatukan studi masing-masing agama itu ke dalam satu kelas bersama dengan pengajar dari semua agama. Walaupun secara akademis maksudnya “mungkin” baik, yaitu memperkenalkan semua agama kepada semua mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum, tetapi untuk menjaga kemurnian aqidah, kemurnian iman menurut agama masing-masing, usaha itu tidak diterima oleh pemuka agama di tanah air. Alasan mereka, kendatipun tidak diadakan “kelas bersama untuk semua agama bagi mahasiswa”, yang penting adalah materi yang disampaikan kepada mahasiswa, sehingga wawasannya tentang agama luas dan jelas. Yang terpenting untuk diperhatikan, Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi diharapkan mampu membekali para mahasiswa dengan

pengetahuan agama yang cukup, sehingga memiliki sikap toleran kepada penganut agama lain, juga akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agamanya lebih dahulu sebelum menguasai atau memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dipelajari (Ali, 1998: 2-3).

Jika kita menyadari akan realitas kehidupan beragama yang pluralistik di Indonesia, maka pembinaan pemikiran dan sikap pluralistik harus dimulai sejak dini. Untuk memberikan basis perubahan yang kuat, maka pembinaan itu dapat dilakukan di sekolah melalui perubahan sistem penyelenggaraan Pendidikan Agamanya. Kombinasi pendekatan pertama dan kedua barangkali akan memberikan dasar-dasar sikap pandang yang berguna baik bagi pembentukan kesalehan agamis, juga akan mengakses sikap pluralistik keagamaan, berupa - antara lain - sikap toleransi yang konstruktif dan positif. Pada akhirnya, cara ini dapat mengarah pada terbinanya kerjasama antar umat beragama secara terbuka dan bebas.

Operasionalisasi dan cara yang terakhir di atas dilakukan dengan mengikutsertakan semua peserta didik dari berbagai latar belakang keagamaan untuk mengikuti pelajaran agama-agama. Aspek normatif dan aspek rasional agama dipadukan secara serasi, sehingga agama sebagai ajaran dan agama sebagai bahan kajian ilmiah (rasional) dapat disejajarkan. Dalam hal ini peserta didik akan mengenal berbagai cara manusia beragama. Tujuannya bukan untuk menunjukkan keunggulan atau kekurangan satu agama terhadap lainnya, melainkan untuk menunjukkan realitas sosiologis masyarakat manusia, bahwa manusia bersatu dalam garis keimanan kepada Tuhan yang satu.

Beberapa argumen bisa dikemukakan untuk memperkuat pendekatan di atas. Secara sosiologis, sekolah adalah sebuah lembaga yang di dalamnya berlangsung

proses-proses sosialisasi dan kulturisasi. Dari sudut pandang sosiologi, sekolah dapat berfungsi sebagai *agent of change* (lembaga pengubah) (Nasution, 1983: 24)

Fungsi di atas tampak sangat kuat dan signifikan, terutama karena sekolah-sekolah di Indonesia (khususnya sekolah-sekolah negeri) menyatu dengan struktur kekuasaan. Untuk itu intervensi kekuasaan sangat memungkinkan untuk merancang perubahan yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan. Jika pemerintah menghendaki kerukunan umat beragama berjalan dengan baik, maka pelibatan sistem pendidikan di sekolah menjadi sangat penting. Salah satu bentuk keterlibatan yang diharapkan dari sekolah – dalam hal ini – adalah turut sertanya sekolah dalam membina sikap-sikap keagamaan pluralistik melalui pembelajaran Pendidikan Agama. Dari sudut pandang sejarah agama-agama dan perenialisme ajaran agama, agama-agama (terutama agama-agama Samawi) sesungguhnya memiliki akar yang sama, yaitu dari Tuhan dan memiliki karakter ajaran agama yang sama, yaitu sama-sama mengajarkan kebaikan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, Pendidikan Agama di sekolah di samping menunjukkan adanya pluralitas keberagamaan manusia juga menunjukkan aspek transendensi agama yang mempertemukan berbagai agama. Dari sudut pandang psikologi, penyelenggaraan Pendidikan Agama yang pluralistik ini harus memperhatikan beberapa catatan penting. *Pertama*, Pendidikan Agama yang memadukan aspek teologis-normatif dan aspek rasional-kritis tidak tepat diterapkan bagi peserta didik yang belum mampu berpikir kompleks. Oleh karena itu, sangat tidak tepat cara ini diterapkan bagi para siswa sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. *Kedua*, peserta didik di sekolah-sekolah rendah (dasar) sampai menengah seperti itu cenderung mengambil pola-pola pikir dan perilaku

yang sederhana, sehingga pengenalan konsep pluralistik akan sangat memberatkan psikologis dan sosiologis mereka. *Ketiga*, pengenalan ke arah pemikiran filosofis untuk menemukan titik temu agama hanya mungkin dilakukan di sekolah tinggi atau Perguruan Tinggi.

Kendala yang barangkali muncul, terkait dengan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi (dalam hal ini Perguruan Tinggi Umum) adalah minimnya alokasi waktu yang disediakan untuk mata kuliah Pendidikan Agama, yakni hanya 2 sks atau 4 sks dalam setiap jenjang (strata) pendidikan, baik untuk tingkat diploma maupun tingkat sarjana. Waktu yang demikian singkat ini sangat menyulitkan dalam pembagian alokasi bagi setiap materi (topik bahasan) yang diberikan. Jangankan untuk memberikan Pendidikan Agama yang pluralistik, untuk mengajarkan satu agama saja yang lebih mendalam, jatah 2 sks atau 4 sks ini belum memadai. Untuk itu pemerintah melalui Dirjen Dikti Depdiknas seharusnya memberikan kebijakan untuk menambah alokasi waktu yang lebih banyak bagi pembelajaran Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum. Kondisi seperti ini sangat berbeda dengan kondisi di IAIN atau sekolah tinggi agama lain yang memang memfokuskan pada kajian-kajian keagamaan. Di IAIN terdapat jurusan atau program studi yang secara khusus mengkaji berbagai agama, yaitu jurusan Perbandingan Agama yang berada di Fakultas Ushuluddin. Lahirnya jurusan ini, menurut Azyumardi Azra (1998: 7), merupakan hasil eksperimen Dr. Mukti Ali yang berhasil, khususnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendekatan yang ditawarkan Mukti Ali dalam kajian perbandingan agama pada intinya menekankan pada pendekatan “holistik” terhadap agama, yakni mencoba melihat dan memahami fenomena agama dari seluruh aspeknya. Dari pendekatan yang bersifat holistik ini akan berkembang dialog

antar agama, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya saling pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Pola yang senada juga diterapkan di Perguruan Tinggi Protestan (Perguruan Tinggi Teologi). Arah studi agama di Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia adalah:

1. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa akan kemajemukan agama-agama, khususnya yang ada dalam masyarakat kita.
2. Membekali mahasiswa sebagai calon pelayan gereja untuk dapat mengenal, hidup, dan bekerja sama dengan penganut agama lain, serta menangani masalah bersama seperti ketidakadilan dan kemiskinan.
3. Mengenali perbedaan-perbedaan dengan agama-agama lain, supaya dapat saling menghargai dan menerima dalam perbedaan-perbedaan itu.
4. Menunjang dalam upaya berteologi, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi agama (van Doorn-Harder, 1997: 69)

Di samping itu, lembaga-lembaga pendidikan teologi di Indonesia perlu mengembangkan studi agama-agama secara interdisipliner dengan memberi perhatian pada: (1) pola-pola perjumpaan antar umat beragama, khususnya Kristen dan non-Kristen; (2) Pandangan dan komitmen agama-agama terhadap berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya; dan (3) Agama dan politik dengan perhatian pada tempat dan peran agama dalam percaturan politik dalam sejarah Indonesia (Ngelow, 1998: 8). Pola dan perhatian seperti inilah yang secara langsung membekali gereja dan umat Kristen dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Di Perguruan Tinggi Katolik pun juga diterapkan pola yang hampir sama. Studi agama-agama di Perguruan Tinggi Katolik diharapkan dapat ikut membuka horison lebih luas bagi umat beragama manapun untuk mengolah hidup

batin lebih mendalam maupun mengolah keterlibatan sosial menuju kehidupan bersama yang lebih adil dan manusiawi. Di sinilah akan terjadi dialog dan kerukunan antar umat beragama yang sesungguhnya. Studi agama-agama selayaknya membantu umat beragama untuk memasuki kenyataan yang *ultimate* sebagai yang *superabundant* dan tidak tertangkap aerta terkuasai sepenuhnya oleh kenyataan historis (Banawiratma, 1998: 10).

Alokasi waktu yang minim bagi Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum seperti di atas sangat menyulitkan penerapan metode studi agama secara pluralistik. Yang dapat dilakukan dengan alokasi yang terbatas tersebut barangkali hanyalah memberikan topik kajian khusus mengenai toleransi umat beragama sehingga setiap pemeluk agama memiliki kesadaran akan kebenaran agama yang dianut dan kesadaran untuk menghormati pemeluk agama lain.

Kendala lain yang mungkin timbul adalah terkait dengan sumber daya manusianya, dalam hal ini adalah para dosen Pendidikan Agama. Masih sedikit para dosen yang memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai agama. Secara umum, para dosen Pendidikan Agama, khususnya di Perguruan Tinggi Umum, masih ditekankan untuk mendalami pengetahuan keagamaannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Masih belum ada kebijakan yang mengarah untuk peningkatan pengetahuan keagamaan dosen yang lebih menyeluruh dengan mengkaji agama-agama lain. Untuk menghadirkan para dosen Pendidikan Agama dari berbagai agama dalam satu kelas pun bukan merupakan suatu yang mudah, baik secara teknis maupun nonteknis.

Dari kenyataan di atas maka pembelajaran Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum yang mengarah kepada terbinanya kerukunan umat beragama masih memerlukan kajian-kajian

yang lebih mendalam. Oleh karena itu, pembinaan sikap-sikap pluralistik harus diberikan sejak dini di sekolah – mulai dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi – sehingga akan menjadi probabilitas yang lebih mungkin di dalam proses sosialisasi dan kulturisasi lembaga pendidikan.

Akhirnya, penerapan pendekatan Pendidikan Agama yang pluralistik untuk pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan tawaran yang *debatable*. Penerapan cara ini membutuhkan landasan kerja yang kuat dan ditopang oleh aspek-aspek ilmiah dan manajemen yang handal.

Kesimpulan

Kehidupan yang pluralistik, termasuk dalam hal beragama, merupakan *sunnatullah* atau sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini merupakan realitas dan sekaligus tantangan bagi manusia bagaimana dapat hidup dengan baik dalam suasana yang plural. Pluralitas dalam bidang agama seringkali menunjukkan tensi lebih kuat dan berdampak lebih kuat dalam percaturan kehidupan manusia Indonesia jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain seperti bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang politik.

Berbagai cara ditempuh untuk dapat membina kerukunan hidup umat beragama di tengah masyarakat. Hanya saja kompleksitas persoalan agama itu sendiri telah membuat pemecahannya begitu rumit. Pelaksanaan Pendidikan Agama yang bersifat pluralistik di sekolah, khususnya di Perguruan Tinggi Umum, barangkali dapat memberikan sumbangan yang dapat dijadikan sarana penuntasan pertikaian antar umat beragama di tanah air kita tercinta ini, meskipun membutuhkan waktu yang agak lama. *Wallahu A'lam*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. (1999). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. II.
- Ahmad Sukardja. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Ahmad, Zainal Abidin. (1973). *Piagam Nabi Muhammad SAW. Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, M. Daud. (1998). "Studi Agama di Lingkungan Perguruan Tinggi Umum Negeri". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Kerukunan Umat Beragama dan Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi" yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) Indonesia Yogyakarta 14-15 Februari.
- Azra, Azyumardi. (1998). "Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Kerukunan Umat Beragama dan Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi" yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) Indonesia Yogyakarta 14-15 Februari.
- Banawiratma, J.B. (1998). "Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi Katolik". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Kerukunan Umat Beragama dan Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi" yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) Indonesia Yogyakarta 14-15 Februari.
- Bellah, Robert N. (1976). *Beyond Belief: Essays on Religion in Post*

- Tradisional World*. New York: Harper and Row Publisher.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 263/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
- Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis. (1995). *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. (1998). "Dialog di Antara Ahli Kitab (Ahl Al-Kitab): Sebuah Pengantar". Kata Pengantar dalam George B. Grose & Benjamin J. Hubbard (Ed.). *Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog*. Terj. oleh Santi Indra Astuti. Bandung: Mizan. Cet. II.
- Nasution, S. (1983). *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Penerbit Jemmars.
- Ngelow, Zakaria J. (1998). "Iman, Ilmu, dan Kemanusiaan: Studi Agama-agama di Lingkungan Perguruan Tinggi Protestan". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Kerukunan Umat Beragama dan Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi" yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) Indonesia Yogyakarta 14-15 Februari.
- Rosariyanto, FL. Hasto. 2001. "Right or Wrong, My Church". Dalam I. Subaryo ... (et. al.). *Tulus Seperti Merpati, Cerdik Seperti Ular*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Taher, Tarmizi. (1997). *Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia*. Jakarta: CENSIS.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Van Doorn, Pietternella-Harder. (1997). "Studi Agama-agama dan Posisinya di Sekolah-sekolah Teologi protestan di Indonesia". Dalam *Jurnal Teologi Gema* No. 52/1997